

**PENGELOLAAN MASALAH LINGKUNGAN BERBASIS SOCIAL
EMPOWERMENT OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIAMIS**

Yusrina Hanum¹, Kiki Endah², Aditiyawarman³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹⁾²⁾³⁾

e-mail: yusrina.hanum@gmail.com¹, kikiendah1212@gmail.com²,
aditiyawarman86@gmail.com³

Submitted: 23-08-2024, Reviewed: 31-08-2024, Published: 12-09-2024

ABSTRAK

Dinas Perumahan Rakyat dan permukiman lingkungan Kabupaten Ciamis tidak melakukan pekerjaan yang ideal dalam mengelola isu lingkungan melalui pemberdayaan sosial. Hal ini memotivasi kami untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Bukti dari penelitian menunjukkan bahwa lingkungan Kabupaten Ciamis dan Dinas Perumahan Rakyat kurang mampu dalam mengelola isu lingkungan terkait pemberdayaan sosial. Tantangan di bidang ini termasuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, kurangnya bantuan dari pemerintah dan kelompok non-pemerintah, dan kurangnya dana secara umum. Ada kurangnya antusiasme terhadap inisiatif ini sejak awal, dan peluncurannya lamban, sehingga gagal mencapai tujuannya. Upaya yang dilakukan, seperti peningkatan edukasi, kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan program-program lingkungan yang diinisiasi oleh DPRKPLH. Dengan terus mengembangkan pendekatan-pendekatan inovatif dan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Ciamis akan semakin baik dan berkelanjutan di masa depan.

Kata Kunci: *Pengelolaan; Lingkungan; Social Empowerment*

PENDAHULUAN

Kabupaten Ciamis yang berada di provinsi Jawa Barat memiliki pertumbuhan kota yang sangat cepat. Namun, seiring dengan perkembangan tersebut muncul berbagai masalah dalam pengelolaan lingkungan, terutama di kawasan permukiman kumuh. Masyarakat yang tinggal di daerah kumuh seringkali berpenghasilan rendah dan tinggal di daerah dengan kondisi lingkungan dan infrastruktur yang buruk. Salah satu masalah ini adalah sanitasi yang tidak memadai, akses terbatas ke air bersih, dan kondisi bangunan yang tidak layak huni. Permasalahan permukiman kumuh harus segera diselesaikan, beberapa wilayah di Kabupaten Ciamis berada dalam kategori kumuh. Permasalahan ini berdampak pada kualitas hidup penduduk dan dapat menghambat kemajuan daerah. Misalnya, keadaan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit menular, yang pada gilirannya berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pengelolaan Lingkungan melalui penggunaan teknologi, termasuk keterlibatan masyarakat dalam pengambilan

keputusan, dan menciptakan cara-cara baru untuk bereaksi terhadap masalah lingkungan adalah contoh tata kelola yang inovatif. Mengingat bahwa melibatkan masyarakat dalam implementasi kebijakan dan pengambilan keputusan dapat meningkatkan partisipasi, penerimaan, dan keberlanjutan inisiatif lingkungan, pemberdayaan sosial menjadi komponen penting dalam konteks ini.

Bagian integral dari penerapan tata kelola yang inovatif adalah kerja lembaga pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang membidangi pengelolaan lingkungan. Kebijakan lingkungan mungkin memiliki efek menguntungkan yang lebih signifikan dan bertahan lama ketika masyarakat secara aktif terlibat dalam penciptaan dan pelaksanaannya. Dengan demikian, upaya Departemen Perumahan Rakyat dan lingkungan untuk mengatasi masalah lingkungan melalui integrasi Tata Kelola yang Inovatif dan strategi pemberdayaan sosial akan menjadi fokus utama penelitian ini.

Peraturan ini merinci kebijakan, strategi, dan langkah teknis yang harus diterapkan untuk meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan kumuh di Indonesia, sesuai peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 02/PRT/M / 2016. Pengurangan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas hidup penduduk kumuh menjadi tujuan utamanya.

Tujuan PERPRES No. 87 Tahun 2014 tentang percepatan penanganan perkampungan kumuh perkotaan adalah mempercepat proses penanganan perkampungan kumuh perkotaan dengan menggunakan strategi terpadu. Sebagai bagian dari perjuangannya melawan daerah kumuh, aturan ini menetapkan tugas dan kewajiban beberapa entitas, seperti pemerintah federal, pemerintah negara bagian dan kota, dan masyarakat.

Struktur dan aktivitas kota dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangannya. Seberapa cepat sebuah kota menjadi urban dipengaruhi oleh seberapa terkonsentrasi aktivitasnya. Efek positif dan negatif dilihat oleh sebuah kota seiring dengan peningkatan derajat urbanisasinya. Peningkatan populasi dan laju urbanisasi yang tidak terkendali merupakan konsekuensi dari tren saat ini menuju urbanisasi yang cepat. Faktor utama dalam perluasan permukiman kumuh yang cepat adalah peningkatan populasi yang dramatis dan relokasi berikutnya ke kota-kota.

Program KOTAKU merupakan inisiatif untuk secara sistematis mengentaskan perkampungan kumuh perkotaan di Indonesia. Pembangunan yang setara dan berkelanjutan adalah tujuan pemerintah, dan inisiatif ini merupakan langkah ke arah itu. Untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh perkotaan dan menggalakkan gerakan 100-0-100, Direktorat permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ciamis meluncurkan Program Kota Bebas Permukiman Kumuh (KOTAKU). Artinya, setiap orang memiliki akses penuh

terhadap air minum yang aman, tidak ada yang tinggal di daerah kumuh, dan setiap orang memiliki akses terhadap sanitasi yang memadai.

Menurut laporan program pemukiman manusia perserikatan bangsa, di Indonesia pada tahun 2020 sudah mencapai 29,929 juta jiwa yang mengalami kemiskinan, sehingga menyebabkan kawasan pemukiman kumuh. Dan itu meningkat menjadi 1.059 milyar masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh. Kawasan pemukiman kumuh di Indonesia mencapai 4.170 hektar. Di Kabupaten Ciamis terdapat 366,54 hektar kawasan permukiman kumuh dan tersebar di 71 titik, tersebar di 32 Desa dan Kelurahan serta ada di 10 Kecamatan. Jika di presentasikan di Kabupaten Ciamis berdada di 93,42 persen kawasan permukiman kumuh ringan dan 6,58 persen kawan permukiman kumuh berat.



Gambar 1. Latar Belakang dan Tujuan Kotaku

Sumber: kotaku.pu.go.id, 2024.

Program Kotaku di Jawa Barat terdiri dari dua bagian: satu bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh di 27 kota / kabupaten di 123 kabupaten dan 3.933 desa, dan satu lagi bertujuan untuk mencegah dan mengembangkan permukiman kumuh di 25 kota/kabupaten di 179 kabupaten dan 1.308 desa. Ini termasuk inisiatif pembangunan yang bertujuan untuk menghindari masalah yang muncul. Kotaku telah banyak membantu Kabupaten dan kota, salah satunya Kabupaten Ciamis. Wilayah Kabupaten Ciamis berada di wilayah Jawa Barat. Meskipun tidak semua perkampungan kumuh dan desa Kabupaten Ciamis mendapat manfaat dari Program Kotaku, namun dilaksanakan di dua kecamatan dan dua puluh satu desa / kelurahan. Secara keseluruhan, sepuluh kabupaten-Baregbeg, Cijeunjing, Indah, Panjalu, Pamarican, Ciamis, Banjarsari, Kawali, Sindangkasih, dan Cikoneng – tetap terdampak oleh kawasan kumuh. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu dari sekian banyak kabupaten di Indonesia yang dilanda daerah kumuh dan sangat membutuhkan bantuan.

Studi oleh Smith et al. (2020) menyoroti peningkatan risiko penyakit akibat kondisi lingkungan yang tidak sehat di kawasan permukiman kumuh. Permukiman kumuh, termasuk masalah sanitasi dan akses air bersih, dirinci dalam studi yang

dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Kabupaten Ciamis. Dinas Perumahan Rakyat dan lingkungan Kabupaten Ciamis hingga saat ini belum memberikan pengelolaan tantangan lingkungan yang terbaik yang berpusat pada pemberdayaan sosial. Inisiatif nasional untuk meringankan daerah kumuh termasuk Program KOTAKU ini. Tampaknya ada masalah di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Lingkungan kabupaten Ciamis, menurut pengamatan penulis. Oleh karena itu berikut indikator-indikator permasalahan penelitian :

Tingkat Kepadatan Penduduk dengan kondisi sosial dan lingkungan menjadi lebih buruk di daerah kumuh. Rumah-rumah dibangun berdekatan dan seringkali tanpa perencanaan yang baik, menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan rawan terhadap bencana seperti kebakaran. Kualitas Bangunan, banyak bangunan di daerah kumuh dibangun dengan bahan-bahan yang tidak tahan lama dan tidak memenuhi standar bangunan yang layak huni, sehingga lingkungan menjadi rawan terhadap kerusakan dan penghuni tidak aman. Berdasarkan survei oleh Dinas Perumahan Rakyat, sekitar 40% bangunan di kawasan kumuh Kabupaten Ciamis tidak memenuhi standar kelayakan huni dan 70% kawasan kumuh memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Suhendra, pemberdayaan merupakan "kegiatan dinamis yang berkesinambungan yang secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolusioner dengan keterlibatan semua potensi" (2006: 74-75). Semua hal dipertimbangkan, pemberdayaan adalah gagasan yang berpusat pada kekuasaan (Depkes. Ali Aziz dkk., 2005: 169). Intinya, memutuskan hubungan antara subjek dan objek adalah inti dari pemberdayaan. Mengenali keterampilan atau kekuatan objek adalah fokus dari teknik ini. Sangat penting, dalam pandangan proses ini, kekuatan untuk beralih dari subjek ke objek. Dengan mengubah individu dari objek menjadi subjek, atau "yang baru", pemberdayaan menciptakan tatanan sosial di mana interaksi antara orang-orang hanya ditentukan oleh status mereka sebagai subjek satu sama lain.

Menurut Mardiasmo, 2004: 17 Governance dapat dipahami sebagai cara penyelenggaraan urusan publik. Governance dan innovative governance di definisikan secara berbeda-beda oleh ahli, namun dari perbedaan definisi dan pemahaman tersebut dapat diambil satu tema umum yang dapat menampung seluruh pendapat para ahli tersebut.

Kaitannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana innovative governance dalam mengelola permasalahan lingkungan hidup berbasis social empowerment. Jacobs, J. (1961) berpendapat bahwa kawasan kumuh bukanlah hasil dari kegagalan masyarakat, tetapi lebih merupakan hasil dari

kebijakan pembangunan yang salah dan kurangnya perencanaan yang baik. Dia menyoroti pentingnya diversitas, kepadatan, dan interaksi sosial dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi masalah lingkungan permukiman kumuh, diperlukan pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Mengatasi masalah ini membutuhkan program pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kebutuhan dasar penduduk, peningkatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan perlindungan lingkungan. Di seluruh dunia, lingkungan permukiman kumuh dapat diubah menjadi tempat yang layak huni dan berkelanjutan bagi jutaan orang.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. studi yang menggunakan teknik deskriptif terhadap hasil studi adalah apa itu metode kualitatif, menurut Ramdhan (2021: 7). Jenis penelitian deskriptif ini berusaha melakukan apa yang disarankan oleh namanya: mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi fenomena yang sedang diselidiki. Pernyataan masalah yang ideal untuk penelitian deskriptif bersifat spesifik, tidak terlalu digeneralisasikan, dan memiliki beberapa manfaat ilmiah.

Penelitian ini menggunakan kombinasi tinjauan pustaka dan kuesioner serta wawancara untuk mengumpulkan data dari hingga empat informan. Selain itu, metode yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini meliputi pengolahan dan evaluasi terhadap data yang terkumpul. Karena peneliti mengumpulkan data kualitatif berupa kata-kata dari sumber-sumber seperti wawancara, observasi, dan intisari dokumen, maka analisis data kualitatif merupakan teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Pengelolaan Masalah Lingkungan Berbasis *Social Empowerment* Oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis maka disajikan sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memberikan respon terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman berbasis *social empowerment* untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dimensi kebijakan inovatif dengan indikator Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memberikan respon terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman berbasis *social empowerment* untuk

menciptakan lingkungan yang lebih baik sudah optimal. Dilakukan dengan berbagai pendekatan salah satunya memberikan respon terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman berbasis pemberdayaan sosial untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik sudah optimal.

Adapun hasil observasi dilapangan dapat dilihat bahwa dimensi kebijakan inovatif dengan indikator Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memberikan respon terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman berbasis social empowerment untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik sudah optimal. Hal ini menunjukkan Banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam program penghijauan dan pengelolaan sampah menunjukkan tingginya antusiasme dan kesadaran lingkungan, kawasan yang sebelumnya kumuh kini menjadi lebih bersih dan asri dengan adanya taman-taman komunitas dan program penghijauan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang praktik ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menganalisis bahwa dimensi kebijakan inovatif dengan indikator Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memberikan respon terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman berbasis social empowerment untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut Program-program yang dijalankan menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas lingkungan permukiman dan meningkatkan kesadaran serta kapasitas masyarakat dalam menjaga lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi model bagi daerah lain dalam mengelola lingkungan permukiman dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan inovatif.

Hambatan-hambatan yang dihadapi terkait dimensi kebijakan inovatif dengan indikator Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memberikan respon terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman berbasis social empowerment untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kurangnya dukungan dan keterlibatan masyarakat menghambat keberhasilan program Implementasi kebijakan menjadi terhambat karena adanya resistensi dari pihak-pihak yang merasa nyaman dengan cara-cara lama.

Lingkungan yang lebih baik dapat dicapai melalui lebih banyak dukungan dan keterlibatan masyarakat, rasa memiliki yang lebih kuat terhadap program pengelolaan lingkungan, lebih sedikit penolakan terhadap perubahan, dan lebih banyak penerimaan terhadap inovasi (Amelia, L., Sihabudin, A. A., & Nursetiawan, I., 2024). Hal ini semua dimungkinkan melalui upaya mengatasi hambatan dimensi kebijakan yang inovatif dengan indikator Dinas Perumahan Rakyat dan lingkungan

hidup yang merupakan respon terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan berbasis pemberdayaan sosial.

Temuan dari penelitian studi tentang kebijakan kreatif dalam kemitraan dengan Departemen Perumahan Rakyat dan lingkungan menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat melalui pengelolaan ruang fisik pemukiman yang diberdayakan secara sosial. Terlepas dari banyak tantangan, DPRKPLH telah mencapai hasil yang signifikan melalui penerapan kebijakan baru dalam pengelolaan lingkungan permukiman berbasis pemberdayaan sosial. Lebih banyak dana, prosedur birokrasi yang disederhanakan, lebih banyak keterlibatan masyarakat, pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, dan lebih banyak teknologi dapat membantu mengatasi tantangan seperti kompleksitas birokrasi, kurangnya keterlibatan masyarakat, penolakan terhadap perubahan, dan kendala teknis dan teknologi. Inisiatif ini diyakini akan membantu kebijakan inovatif tetap berjalan dengan baik dan memiliki efek jangka panjang yang menguntungkan bagi lingkungan pemukiman.

2. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan permukiman melalui pembentukan bank sampah merupakan langkah yang sangat positif.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dimensi kebijakan inovatif dengan indikator Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan permukiman melalui pembentukan bank sampah merupakan langkah yang sangat positif sudah optimal. Dilakukan dengan berbagai pendekatan salah satunya memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan permukiman melalui pembentukan bank sampah merupakan langkah yang sangat positif serta melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam proses pembentukan dan pengelolaan bank sampah, termasuk warga setempat, tokoh masyarakat, dan organisasi lingkungan.

Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa bank sampah merupakan langkah awal yang sangat baik untuk mencapai penyelesaian pengelolaan lingkungan, yang merupakan produk dari kebijakan inovatif yang menggabungkan indikator dari Departemen Perumahan Rakyat dan lingkungan. Telah terjadi peningkatan yang nyata dalam pemahaman masyarakat umum tentang pentingnya pengelolaan limbah yang tepat dan menjaga lingkungan alam yang masih asli.

Para peneliti menggunakan data wawancara dan observasi untuk menarik kesimpulan bahwa bank sampah merupakan langkah awal yang sangat baik untuk mencapai penyelesaian pengelolaan lingkungan yang menggabungkan dimensi kebijakan inovatif dengan indikator dari Departemen Perumahan Umum dan permukiman ekologis. Hal ini terbukti dengan mempertimbangkan faktor-faktor

berikut: Metode pemberdayaan sosial telah berhasil karena tingginya tingkat keterlibatan masyarakat dalam program bank sampah, yang tidak hanya membantu menjaga kebersihan lingkungan tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

Indikator Departemen Perumahan Rakyat untuk kawasan pemukiman dan lingkungan memberikan langkah positif untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan dimensi kebijakan yang inovatif, seperti memungkinkan lebih banyak kelonggaran bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan permukiman melalui pembuatan bank sampah. Karena kurangnya pendidikan tentang pentingnya pengelolaan sampah, keengganan untuk mengikuti program bank sampah, infrastruktur yang tidak memadai, dan masalah lainnya, banyak kota berjuang untuk mengelola sampahnya dengan baik.

Dengan meminta bantuan media lokal, sekolah, dan tokoh masyarakat, yang akan menyebarkan informasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan menyediakan sumber daya yang diperlukan seperti timbangan dan peralatan pemilahan, masyarakat akan dapat mengambil bagian dalam penyelesaian pengelolaan lingkungan dan menghilangkan hambatan. untuk dimensi kebijakan yang inovatif. Hal ini akan dicapai melalui pendirian bank sampah. Kami mengoptimalkan rute pengangkutan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bersama Dinas Perumahan Rakyat dan lingkungan permukiman, sangat disarankan agar masyarakat diberikan kontrol lebih terhadap pengelolaan lingkungan permukiman dengan mendirikan bank sampah. Kebijakan kreatif Departemen Perumahan Rakyat tentang pemasangan bank sampah di kawasan pemukiman dan lingkungan telah menghasilkan hasil terbaik. Ukuran kunci keberhasilan adalah peningkatan kualitas lingkungan permukiman, keuntungan ekonomi, kesadaran lingkungan yang lebih besar, dan keterlibatan masyarakat yang aktif. Selain membuat hidup masyarakat lebih mudah secara finansial dan sosial, tindakan ini juga membuat dunia menjadi tempat tinggal yang lebih baik dan bersih. Dengan regulasi yang tepat dan pendampingan sebaik mungkin, hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan sosial dalam pengelolaan lingkungan permukiman dapat menjadi metode yang berhasil.

3. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk mengelola masalah lingkungan permukiman kumuh menjadi lebih bermanfaat seperti mengelola limbah lingkungan.

Data wawancara menunjukkan bahwa pendekatan terbaik untuk menangani masalah lingkungan kumuh, seperti pengelolaan sampah, adalah dimensi kebijakan inovatif yang menggabungkan indikator dari Departemen Perumahan Rakyat dan lingkungan. Diterapkan dalam berbagai cara, salah satunya adalah pemeliharaan

kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dengan melanjutkan inisiatif pendidikan dan penjangkauan.

Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa dimensi kebijakan yang inovatif dengan indikator informan membantu masyarakat mengatasi masalah lingkungan; daerah kumuh mendapat manfaat dari pengelolaan sampah yang lebih baik; dan Dinas Perumahan Rakyat dan lingkungan juga penting dalam hal ini. Pengomposan dari sampah organik, daur ulang plastik, dan sampah sebagai bahan bangunan adalah beberapa topik yang dibahas dalam pelatihan teknis yang ditawarkan organisasi kepada anggota masyarakat. Program ini juga mencakup praktik pengelolaan limbah, daur ulang, dan penggunaan limbah.

Wawancara dan data observasi digunakan untuk menarik kesimpulan tentang hubungan antara dimensi kebijakan inovatif, indikator lingkungan, dan kemampuan Departemen Perumahan Rakyat untuk membantu penghuni daerah kumuh menangani masalah lingkungan. Dilihat dari sudut-sudut ini: Dengan menerapkan program pendampingan untuk pengelolaan sampah, jumlah sampah di lingkungan pemukiman telah berkurang, dan akibatnya daerah kumuh berkurang.

Indikator dari komponen kebijakan baru Departemen Perumahan Rakyat tentang kawasan pemukiman dan lingkungan membantu masyarakat mengatasi tantangan lingkungan permukiman kumuh dengan cara yang lebih praktis, termasuk pengelolaan sampah. Banyak kota yang awalnya tidak termotivasi untuk bergabung dan adopsi program tersebut lamban karena gagal melihat nilai pengelolaan sampah.

Perbaikan pengelolaan sampah lingkungan, peningkatan kapasitas dan kualitas pelaksanaan program, dan eksplorasi sumber pendanaan alternatif seperti corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan swasta merupakan upaya masyarakat untuk mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh dimensi kebijakan yang inovatif dengan indikator dari Dinas Perumahan Rakyat dan lingkungan hidup.

Anggota masyarakat secara aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah, dan hasil penelitian tentang dimensi kebijakan inovatif dengan Departemen Perumahan Rakyat dan lingkungan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pengelolaan masalah lingkungan, menjadikan daerah kumuh lebih bermanfaat dengan cara lain., seperti pengelolaan sampah lingkungan.

KESIMPULAN

Pengelolaan Masalah Lingkungan Berbasis *Social Empowerment* Oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis belum optimal. Hambatan dalam hal ini antara lain minimnya kurangnya dukungan dari pihak pemerintah dan non pemerintah yang masih minim, kurangnya dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah awalnya banyak masyarakat yang enggan untuk berpartisipasi, implementasi program berjalan lambat dan tidak

mencapai partisipasi yang diharapkan. Upaya yang dilakukan, seperti peningkatan edukasi, kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan program-program lingkungan yang diinisiasi oleh DPRKPLH. Dengan terus mengembangkan pendekatan-pendekatan inovatif dan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Ciamis akan semakin baik dan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, L., Sihabudin, A. A., & Nursetiawan, I. (2024). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Industri Rumah Tangga di Desa Sukasari Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 39-54.
- Aziz, Moh. Ali dkk, 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara.
- Erwin, Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176.
- Lubis, B. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Inovatif dan Kolaboratif Dimasa Pandemi Covid 19 di Kota Cimahi. *Jurnal Media Birokrasi*, 67-76.
- Marliani, L. (2020). *Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 48-67.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governane dan Good Coorporate*. PT. Bumi aksara. Jakarta
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: STKSPRESS.